

Dr. Waluyo
Ketua Tim Kerja Optimalisasi
Kinerja ASN

STRATEGI PERCEPATAN PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019

Hotel Bidakara, 16 Oktober 2019

***“MEWUJUDKAN OPTIMALISASI KINERJA,
FLEKSIBILITAS DAN PRODUKTIVITAS ASN”***

Pokok Pembahasan

1 TANTANGAN PENERAPAN PP 30/2019

2 PELUANG PENERAPAN PP 30/2019

3 STRATEGI PENERAPAN PP 30/2019





1

TANTANGAN PENERAPAN PP 30/2019

KONDISI EXISTING

PERMASALAHAN

- Penilaian Prestasi Kerja belum dapat memotret kinerja PNS sesungguhnya;
- Penilaian prestasi kerja terkesan formalitas karena pegawai harus memiliki nilai Baik supaya bisa naik pangkat 4 tahun sekali;
- Hello effect penilaian prestasi kerja dari atasan;
- Kinerja pegawai tidak terkoneksi langsung dengan kinerja organisasi;
- Kinerja atasan tidak dijabarkan ke dalam kinerja bawahan;
- Penilaian kinerja dilakukan hanya setahun sekali, sehingga tidak dapat diketahui progress kinerja pegawai.

TANTANGAN

- Perubahan mindset dari bekerja menjadi berkinerja dan penilaian yang obyektif;
- Perlunya tools manajemen kinerja yang efektif dan implementable;
- Waktu transisi implementasi PP 30/2019 di tahun 2021 tersisa 14 bulan efektif.

**PERLU STRATEGI
YANG EFEKTIF**



2

**PELUANG
PENERAPAN PP 30/2019**

PELUANG: KOMITMEN PEMERINTAH

RPJM IV (2020-2024)

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang :

- **MANDIRI**
- **MAJU**
- **ADIL**
- **MAKMUR**

Melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh:

**SDM BERKUALITAS
DAN BERDAYA
SAING**

FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pelayanan Dasar dan
Perlindungan Sosial

1

SDM Berkualitas dan
Berdaya Saing

2

Pembangunan
Karakter Bangsa

3

**VISI
INDONESIA
A 2045**

- **BERDAULAT**
- **MAJU**
- **ADIL**
- **MAKMUR**

PELUANG: KOMITMEN IP PUSAT DAN DAERAH



Banyak Instansi Pemerintah (IP) baik pusat dan daerah yang telah membangun system manajemen kinerja pegawai berbasis aplikasi untuk menilai prestasi kerja pegawai



Pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) di IP Pusat atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di IP Daerah wajib berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai



3

**STRATEGI
PENERAPAN PP 30/2019**

RENCANA AKSI

1

Pembentukan Tim Kerja Optimalisasi Kinerja ASN, yang melibatkan pejabat kunci (key person) di Kementerian PANRB, BKN, LAN, Komisioner KASN, dan pakar manajemen SDM.

Telah terbentuk, Oktober 2019



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
NOMOR 245 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA OPTIMALISASI KINERJA ASN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja ASN, maka dipandang perlu untuk melakukan percepatan persiapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan persiapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Kerja Optimalisasi Kinerja ASN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur tentang Pembentukan Tim Kerja Optimalisasi Kinerja ASN.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340).

MEMUTUSKAN

RENCANA AKSI

2

Exercise dan uji draft peraturan pelaksanaan PP 30/2019 dan PP 11/2017:

- 1) PermenPANRB ttg sistem manajemen penilaian kinerja PNS;
- 2) PermenPANRB ttg tim penilai kinerja PNS;
- 3) PermenPANRB ttg sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian bagi pejabat fungsional yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat Kurang atau Sangat Kurang;
- 4) PermenPANRB ttg mekanisme persetujuan dan evaluasi bersama serta mekanisme pengawasan penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS;
- 5) Perka BKN ttg tata cara survei secara tertutup;
- 6) Perka BKN ttg Pemingkatan Kinerja; dan
- 7) Perka BKN ttg pengelolaan informasi dan data penilaian kinerja PNS.

Target penetapan Desember 2019 – November 2020

Isu Strategis:

- Pemingkatan Kinerja perlu dibuatkan panduan dan pilot project agar tepat sasaran dan tidak terjadi arisan
 - Perlu pilot project untuk membedakan High vs Low Performer
 - Perlu dibuat modul pelatihan/ToT bagi LAN dan BKN serta pengelola kepegawaian/pejabat pengelola kinerja di IP untuk topik seperti: pendokumentasian kinerja, penyusunan target kinerja bagi pejabat fungsional, pemantauan kinerja, bimbingan kinerja,
 - Perlu media sosialisasi dan pelatihan yang lebih efektif seperti e-learning melalui Youtube
 - Perlu ujicoba dan pilot project penyusunan SKP berbasis cascading kinerja dan menantang serta penilaian perioritas
- Perlu ujicoba dan pilot project isu-isu strategis di atas sebelum peraturan teknis sebagai pelaksanaan PP 30/2019

RENCANA AKSI

3

Pilot project persiapan implementasi PP 30 Tahun 2019 pada beberapa IP Pusat dan Daerah terpilih:

- IP yang menjadi pilot project menunjuk 1 (satu) unit kerja yang akan dilakukan exercise misalnya dalam hal: cascading kinerja, uji coba penilaian perilaku 360', praktek bimbingan kinerja, pemeringkatan kinerja, dll;
- IP yang menjadi pilot project akan menjadi locus pembelajaran instansi lain;
- Waktu pelaksanaan Oktober 2019 – Oktober 2020;
- Hasil pilot project akan menjadi masukan dalam perumusan pedoman teknis penerapan PP 30/2019.

IP Pusat Pilot Project*:

1. Kementerian PUPR
2. Kementerian KumHAM
3. Kementerian Dikbud
4. Kementerian Agama
5. BPOM

IP Daerah Pilot Project*:

1. Provinsi DKI Jakarta
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Sulawesi Utara
4. Provinsi Banten
5. Kabupaten Sumedang
6. Kabupaten Sidoarjo
7. Kota Surabaya

**Bagi IP yang ingin menjadi Pilot Project dapat menyampaikan usulan kepada KemenPANRB*



Terima Kasih

